



# Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia

## Prosiding



### Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia **KONASPI VIII** **2016**

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta | 12-15 October 2016



Universitas Negeri Jakarta | [www.seminars.unj.ac.id/konaspi](http://www.seminars.unj.ac.id/konaspi)

**Prosiding**

**Konvensi.**

**Lay Out:**

**Imam F Rahmadi**

**Khairul Umam**

**Danar Hari K.**

**Diterbitkan Oleh:**

**Universitas Negeri Jakarta**

**Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016**

*Editor: Agung Premono, I Wayan Sugita, Ragil Sukarno, M. Ali Akbar*

ISBN 978-602-60240-0-8



**Disclaimer**

This book proceeding represents information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Every reasonable effort has been made to give reliable data and information, but the author(s) and the publisher can not assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use.

*All rights reserved. No part of this publication may be translated, produced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by other any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written consent from the publisher.*

*Direct all inquiries to State University of Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.*

*@2016 by State University of Jakarta*

# KONVENSI NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA (KONASPI) TAHUN 2016

**Penanggung Jawab:**

Rektor UNJ

: Prof. Dr. Djaali

**Panitia Pelaksana**

Ketua

: Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA

Sekretaris

: Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

: Dr. Eng. Agung Premono, MT

**Reviewer:**

Dr. Ucu Cahyana, M.Si.

Dr. Khaerudin, M.Pd.

Dr. Etin Solihatin, M.Pd.

Dr. Gantina Komalasari, M.Psi.

Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.

Dr. Muktiningsih, M.Si.

Dr. M. Jafar, M.Si.

Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si.

Dr. Saparuddin, M.Si.

Samadi, M.Si.

Dr. Nurjanah, M.Pd.

Dr. Rini Puspitaningrum, M. Biomed

**Sekretariat**

Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ

Gedung Rektorat UNJ Lantai 3

Kampus A Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Telp : 021-47860238 / Fax. 021-4895130

Email : [konaspi@unj.ac.id](mailto:konaspi@unj.ac.id)

Web : <http://seminars.unj.ac.id/konaspi>

# KONVENSI NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA (KONASPI) TAHUN 2016

## **Penanggungjawab:**

Rektor UNJ

: Prof. Dr. Djaali

## **Panitia Pelaksana**

Ketua

: Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA

Sekretaris

: Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

: Dr. Eng. Agung Premono, MT

## **Reviewer:**

Dr. Ucu Cahyana, M.Si.

Dr. Khaerudin, M.Pd.

Dr. Etin Solihatin, M.Pd.

Dr. Gantina Komalasari, M.Psi.

Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.

Dr. Muktiningsih, M.Si.

Dr. M. Jafar, M.Si.

Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si.

Dr. Saparuddin, M.Si.

Samadi, M.Si.

Dr. Nurjanah, M.Pd.

Dr. Rini Puspitaningrum, M. Biomed



## Kata Pengantar

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dilaksanakan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) bekerjasama dengan Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri di Indonesia, dan Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI). Konaspi VIII bertempat di Jakarta pada tanggal 12-15 oktober 2016 dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai tuan rumah. Konvensi ini merupakan wahana akademik kaum pendidik Indonesia dalam ikut memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konvensi diikuti oleh para ahli dan pakar kependidikan dengan mengambil tema "*Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia*".

Buku elektronik prosiding ini adalah kompilasi dari semua paper yang dipresentasikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dengan sub-tema:

1. Standarisasi Kelembagaan LPTK
2. Sistem Rekrutmen Mahasiswa LPTK
3. Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas
4. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran LPTK
5. Standar Mutu dan Profesionalisme Guru
6. Sistem Pengangkatan dan Distribusi Guru
7. Standarisasi Pendidikan PAUD dan Dikdasmen
8. Pendidikan Guru dan Peradaban Bangsa

PanitiaKonvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 mengucapkan terima kasih kepada pembicara kunci, para pemakalah yang berkontribusi dalam buku ini dan semua partisan yang menghadiri konvensi ini.

Editor

## DAFTAR ISI

BUKU ABSTRAK	i
DISCLAIMER	ii
SUSUNAN PANITIA	iii
SEKRETARIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

## PEMBICARA UTAMA

KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN DI LPTK Prof. Dr. Djaali	1
STANDARISASI KELEMBAGAAN LPTK MENUJU PENGUATAN PROFESIONALISME GURU Husain Syam	13
PAUD BERKUALITAS: BEBERAPA PERTANYAAN TENTANG STANDAR Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum	18
SISTEM PENDIDIKAN GURU BERASRAMA DAN BERIKATAN DINAS I Nyoman Jampel	28
KOLABORASI STRATEGI PEMBERDAYAAN LINTAS INSTITUSI DAN PARTICIPATORY MANAGEMENT MENUJU SISTEM REKRUTMEN DAN DISTRIBUSI GURU YANG PROPORSIONAL-EFEKTIF DI INDONESIA Prof. Ganefri, Ph.D	35
REFORMASI SISTEM PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU (TANTANGAN DAN AGENDA INDONESIA DI ABAD ASIA) Prof Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	41

## SUB -TEMA I : STANDARISASI KELEMBAGAAN LPTK

A1	PERAN BSNP DALAM MENINGKATKAN KUALITAS GURU MELALUI PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REVITALISASI LPTK Bambang Suryadi	52
A2	KUALITAS LULUSAN LPTK DENGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008-IWA2:2007 (STUDI KASUS DI FT UNJ) Muhammad Yusro, Sahriani Sachrom dan Erna Septiandini	58



A3	AKREDITASI SMK/MAK SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN Santoso Sri Handoyo, Muhammad Yusro dan Aam Amaningsih Jumhur	63
A4	STUDI HASIL ASESMEN INTERNASIONAL PISA 2012 BIDANG LITERASI SAINS DAN MATEMATIKA Cosmas Poluakan	68
A5	MEMBANGUN PERADABAN BANGSA MELALUI PENINGKATAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN GURU Sani Susanti	78
A6	KONTRIBUSI LPTK UNTUK PENINGKATAN PROFESIONALISME CALON GURU MELALUI ATRIBUT MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PERADABAN BANGSA Sudirman	84
A7	INSTITUSI PENDIDIKAN GURU PADA BERBAGAI NEGARA DAN PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) Prof. Rusdi, Ph.D.	90
A8	STUDI KAJIAN PENGREORGANISASIAN KURIKULUM PRODI-PRODI DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNP SEBAGAI ACUAN KEBIJAKAN BAGI UNIVESITAS LPTK LAINNYA Riki Mukhaiyar, Mukhaiyar	97
A9	MODEL AKREDITASI LPTK: SEBUAH USULAN Djuli Djatiprambudi	103
A10	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN GURU (SNPG) Prof. Dr. H. Haris Supratno	108
A11	<i>REWARD DAN PUNISHMENT</i> DALAM DUNIA PENDIDIKAN Ni Ketut Suarni	118
A12	<i>KEY PERFORMANCE INDICATOR</i> DALAM KONTEKS <i>BALANCED SCORECARD</i> (SATU METODE EVALUASI KINERJA PERGURUAN TINGGI JARAK JAUH) Rhini Fatmasari	123
A13	TANTANGAN DAN DINAMIKA PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Noor Hudallah	130

E108	PROFESIONALITAS GURU MATA PELAJARAN EKONOMI AKUNTANSI SMA SE MALANG RAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Cipto Wardoyo dan Sunaryanto	1564
E110	GURU ASEAN: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Yunia Wardi dan Tri Kurniawati	1576

#### **SUB-TEMA VI: SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU**

F1	KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN GURU DI WILAYAH 3T (NIAS SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH DALAM RANAH WILAYAH 3T) Martiman Su'aizisiwa Sarumaha	1582
F2	DILEMATENAGA PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PROVINSI MALUKU) Dr. Abdul Haris Fatgehipon Msi	1591
F3	DEVELOPMENT OF APPOINTMENT AND DISTRIBUTION SYSTEM TEACHER IN WHOLE TERRITORY OF UNITY REPUBLIC OF INDONESIA (PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU PNS DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA) Amos Neolaka	1598
F4	QUALITY HUMAN RESOURCE FULFILLMENT MANAGERIAL STRATEGY IN EDUCATIONAL UNIT OF REMOTE AREA Achmad Supriyanto	1606
F5	SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Purnomo	1612
F6	REDISTRIBUSI GURU MATA PELAJARAN UNTUK OPTIMALISASI KINERJA GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK Ernawati	1618
F7	PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL: STUDI KASUS DI KECAMATAN KABARUAN, KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Revolson Alexius Mege, Alfonds Andrew Maramis	1624
F8	STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK Muhammad Yahya	1630





## STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK

Muhammad Yahya

Jurusan Pendidikan Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar

Email: m.yahya@unm.ac.id

### Abstrak

Pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK merupakan suatu yang penting dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era abad XXI. Program pemerintah dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019, menggambarkan kondisi guru yang tidak merata khususnya guru produktif SMK. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusan peserta didik agar dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan bidang dan program keahlian yang dimiliki, perlu ditunjang tenaga guru yang cukup. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan kebijakan serta tujuan dari pendidikan kejuruan (SMK), dibutuhkan suatu upaya dalam mengimbangi kesiapan tenaga kerja dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan (SMK), dibutuhkan suatu upaya dalam mengimbangi kesiapan tenaga kerja yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi adalah pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan strategi pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK yang terdiri dari: (1) Analisis beban kerja guru produktif SMK; (2) Pemetaan Guru Produktif SMK; (3) Pemerataan Guru Produktif SMK; dan (4) Pengadaan Guru Produktif SMK. Berdasarkan hasil kajian, maka di tarik kesimpulan: (1) Analisis beban kerja Guru Produktif merupakan suatu kegiatan yang meliputi perhitungan kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan penjabaran dari kegiatan pembelajaran atau tatap muka guru per minggu, kemudian dibagi dengan jumlah yakni 24 jam kali tatap muka, di mana alokasi jam pelajaran per minggu pada satuan pendidikan.; (2) Pemetaan guru produktif SMK merupakan suatu kebijakan atau wewenang pemerintah dalam mendistribusi dan memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan kota/kabupaten dan provinsi secara Nasional.; (3) Pemerataan Guru Produktif SMK merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan guru dalam hal tenaga pendidik atau guru produktif pada satuan pendidikan tingkat menengah kejuruan (SMK) secara Nasional.; (4) Pengadaan Guru Produktif SMK merupakan suatu model yang terjabarkan dalam suatu mekanisme untuk pemenuhan kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pada satuan pendidikan (SMK) melalui: (a) proses pengadaan guru produktif SMK; (b) Redistribusi Guru Produktif SMK dan; (c) Pengadaan Guru Produktif SMK untuk pemenuhan guru secara cepat seperti Program Talent Scouting, Program Sarjana Mengajar dan Program Pendampingan SMK.

*Kata Kunci: Kebutuhan, Guru Produktif dan SMK*

### PENDAHULUAN

Program pemerintah dalam Rencana Strategis Kemendikbud Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2019, menggambarkan kondisi distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang telah baik atau memadai. Ketimpangan kondisi proporsi siswa SMK dan SMA/MA, memberikan dampak terhadap berbagai aspek pendidikan baik dari aspek sarana-prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, manajemen dan berbagai hal lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembangunan pendidikan yang sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa program pembangunan pendidikan diberikan untuk mewujudkan perluasan

akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, daya saing keluaran pendidikan dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas serta citra publik tentang pengelolaan pendidikan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2019, menyatakan dalam pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T akan sulit terlaksana karena terbatasnya ketersediaan guru. Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh, (a) terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (b) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten atau kota; (c) belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-murid dan maksimalisasi





meningkatkan mutu dan distribusi guru yang merata. Di sisi lain peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini, tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Berkaitan dengan hal itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."

Hal ini tidak hanya mutu guru, melainkan jumlah guru di sekolah harus seimbang dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Hal tersebut dikarenakan jika dari segi kualitas maupun kuantitas guru terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, peningkatan jumlah guru di sebuah sekolah dapat meningkatkan jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, yang berarti mengurangi akses bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan (Dipolita, 2009:24).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusan peserta didik agar dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan bidang dan program keahlian yang dimiliki. Untuk itu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mampu mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan, menguasai keterampilan teknis dan memiliki sikap hidup yang memadai. Di sisi lain SMK sebagai pendidikan vokasional dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang profesional dengan ciri-ciri karakteristik yang relevan dengan kemampuannya dalam mencari kerja serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Sesuai dengan hal tersebut, dalam merencanakan kebijakan serta tujuan dari pendidikan kejuruan (SMK), dibutuhkan suatu upaya dalam meningkatkan kesiapan berbagai aspek dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada tingkat menengah kejuruan (SMK). Upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat menengah kejuruan (SMK), tidak terlepas dari peran komponen dalam pendidikan itu sendiri. Salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pemenuhan kebutuhan guru produktif di SMK. Guru produktif merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah kejuruan yang terkait langsung dalam proses pembelajaran kejuruan. Sehingga kebutuhan akan tenaga guru merupakan tuntutan yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan guru produktif merupakan komponen yang sangat krusial dan memiliki peran serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan kebijakan dari tujuan pendidikan kejuruan (SMK).

kejuruan yang terkait langsung dalam proses pembelajaran kejuruan. Sehingga kebutuhan akan tenaga guru merupakan tuntutan yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan guru produktif merupakan komponen yang sangat krusial dan memiliki peran serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan kebijakan dari tujuan pendidikan kejuruan (SMK).

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan memaparkan kajian tentang strategi pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK adalah: (1) Analisis beban kerja Guru Produktif SMK; (2) Pemetaan kebutuhan Guru Produktif SMK; (3) Pemerataan Guru Produktif SMK; (4) Pengadaan Guru Produktif SMK.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis beban kerja Guru Produktif SMK 1.1 Perhitungan kebutuhan guru SMK

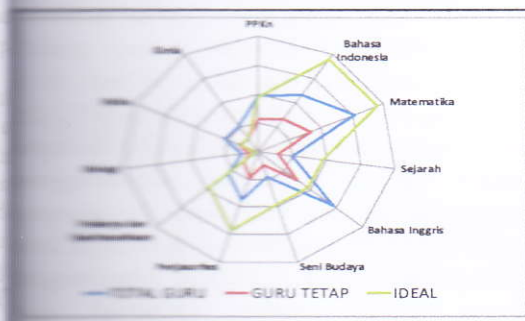
Beban kerja guru merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan, karena beban kerja merupakan indikator dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Menurut Mastini (2013), beban kerja merupakan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan dapat dilihat dari sudut pandang secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif adalah keseluruhan waktu yang dipakai atau jumlah aktivitas yang dilakukan. Sedangkan beban kerja secara subyektif adalah ukuran yang dipakai seseorang terhadap pernyataan tentang perasaan kelebihan beban kerja, ukuran dari tekanan pekerjaan dan kepuasan kerja. Begitu pula Steers dan Porter (2010:11), menyatakan bahwa tinggi rendahnya produktivitas kerja berkaitan erat dengan sistem pemberian kompensasi yang diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat mereka bekerja.

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 mengamanatkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Deskripsi beban kerja guru sebagaimana yang diamanatkan yaitu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Selain itu beban kerja dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 menyatakan bahwa sebagian guru ada yang menambah beban kerjanya, ada pula bagi guru tidak menimbulkan beban kerja.

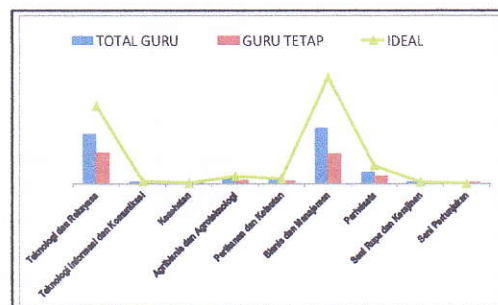


## Daftar Pustaka

FUND	TOTAL ASSETS				REL. GUFS		TOTAL	REL. GUFS	TOTAL	REL. GUFS
	1999	2000	2001	2002	1999	2000				
1000	12719	1492	4398	5777	5321	3474	192		2394	
1001	9322	9322	11797	8378	13360	17278			12415	
1002	12910	12910	18342	6287	15390	5388			10373	
1003	980	980	4398	2394	3425	8550			8471	
1004	12771	12771	14472	7468	3425	6307			2202	
1005	980	980	4397	2388	8420	5328			7138	
1006	11102	11102	6791	4277	14287	5338			5980	
1007	9375	9375	5346	2778	5321	3373			8746	
1008	208	208	11128	2392	1432	4718			13916	
1009	980	980	2349	5428	2348	2355			74	
1010	980	980	2352	1310	2300	2788			2544	
1011	10487	10487	38873	47328	104288	17487			38541	



Kategori (Kategori)	TOTAL (GAMBAR)				JML. GURU TOTAL**	JML. GURU TETAP**	IDEAL	SELISIR TOTAL ***	SELISIR GURU TETAP***
	NO.	PREKUALIFIKASI	ST1	ST2					
1. Kepala Sekolah	10000	10000	10000	10000	24.380	15.250	37.840	-13.550	-22.580
2. Wakil Kepala Sekolah	10000	10000	10000	10000	1.280	558	1.340	-279	-742
3. Kepala Bidang	10000	10000	10000	10000	250	145	342	-86	-195
4. Kepala Bidang	10000	10000	10000	10000	1.050	3.533	-620	-1.544	-1.544
5. Kepala Bidang	10000	10000	10000	10000	2.300	1.201	2.370	-118	-1.150
6. Kepala Bidang	10000	10000	10000	10000	27.140	14.354	51.571	-24.425	-35.973
7. Kepala Bidang	10000	10000	10000	10000	1.382	1.818	3.810	-2.108	-4.594
8. Kepala Bidang	10000	10000	10000	10000	600	350	892	-80	-315
9. Kepala Bidang	10000	10000	10000	10000	20	17	28	-11	-11
10. Kepala Bidang	10000	10000	10000	10000	94.380	57.367	116.115	-41.846	-58.766



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Berdasarkan tabel di atas, idealnya jumlah guru normatif dan adaptif SMK secara nasional adalah 106.808 sedangkan total jumlah guru 88.613, dan guru tetap 47.939, dimana selisih jumlah total - 17.467 dan guru tetap -58.141. Begitu pula pada jumlah guru produktif SMK, idealnya 106.815, sedangkan jumlah total guru produktif 64.949 dan guru tetap 37.94, di mana selisih total -41.486 dan selisih guru tetap -68.868. Hal tersebut menunjukkan secara Nasional terdapat kesenjangan antara kebutuhan guru yang diharapkan dengan penyelenggara pendidikan terutama dalam pemenuhan kebutuhan guru produktif di SMK. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah kebutuhan guru SMK dapat di hitung dengan persamaan berikut:

$$K_{24}^{JTM} = \frac{(MP1 \times \Sigma K1) + (MP2 \times \Sigma K2) + (MP3 \times \Sigma K3)}{24} \quad (1.1)$$

24 = wajib mengajar perminggu, digunakan angka 24  
1,2,3 = tingkat 1,2,dan 3

### Perhitungan Kebutuhan Guru Teknik Konstruksi Baja (ILUSTRASI)





MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU	
		X	XI
1. Bahasa Indonesia	2	2	2
2. Matematika	2	2	2
3. IPA	2	2	2
4. Bahasa Inggris	2	2	2
5. Seni Budaya	2	2	2
6. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
7. Pendidikan Agama Islam	2	2	2
8. Pendidikan Agama Kristen	2	2	2
9. Pendidikan Agama Buddha	2	2	2
10. Pendidikan Agama Hindu	2	2	2
11. Pendidikan Agama Yahudi	2	2	2
12. Pendidikan Agama Jain	2	2	2
13. Pendidikan Agama Sikh	2	2	2
14. Pendidikan Agama Zoroastrian	2	2	2
15. Pendidikan Agama Baha'i	2	2	2
16. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
17. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
18. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
19. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
20. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
21. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
22. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
23. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
24. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
25. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
26. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
27. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
28. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
29. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
30. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
31. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
32. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
33. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
34. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
35. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
36. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
37. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
38. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
39. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
40. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
41. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
42. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
43. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
44. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
45. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
46. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
47. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
48. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
49. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
50. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
51. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
52. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
53. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
54. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
55. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
56. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
57. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
58. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
59. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
60. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
61. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
62. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
63. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
64. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
65. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
66. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
67. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
68. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
69. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
70. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
71. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
72. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
73. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
74. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
75. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
76. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
77. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
78. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
79. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
80. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
81. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
82. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
83. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
84. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
85. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
86. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
87. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
88. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
89. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
90. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
91. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
92. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
93. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
94. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
95. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
96. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
97. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
98. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
99. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2
100. Pendidikan Agama lainnya	2	2	2

**Gambar 2. Perhitungan Kebutuhan Guru Teknik Konstruksi Baja (ILUSTRASI)**

## 2. Pemetaan Guru Produktif SMK

Peranan guru produktif dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan tidak hanya dituntut untuk dapat mengajar dan mengembangkan pembelajaran, melainkan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya, serta memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan pasal 42 ayat (1) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hasil kajian Mulyadi, dkk (2010) menyatakan bahwa pemetaan guru telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun belum menggambarkan kebutuhan spesifik dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Input tenaga pendidik yang dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal diantaranya meliputi relevansi antara kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi dengan potensi yang dimiliki oleh daerah dimana tenaga pendidik itu melaksanakan tugas.

Perkembangan karakteristik program keahlian yang terdapat di SMK cenderung bersifat fluktuatif. Program keahlian (produktif) adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Perubahan tersebut, tentunya akan berpengaruh dan berdampak pada jumlah guru yang ada di SMK.

Hasil analisis kebutuhan dan keadaan guru SMK Negeri yang dilakukan oleh Direktorat Dikmenjur, menyimpulkan bahwa dari sisi jumlah dan spesialisasi guru ternyata masih mengalami kekurangan, sedangkan dari sisi lain mengalami kelebihan. Kelebihan maupun kekurangan guru SMK tersebut tersebar pada guru program Normatif,

Adaptif, Produktif, maupun guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) di semua provinsi. Oleh karena itu perlu dipandang melakukan suatu terobosan atau inovasi dalam pemenuhan kebutuhan guru khususnya pada tingkat satuan pendidikan (SMK) melalui pemetaan ulang terhadap kondisi guru saat ini.

Berkaitan dengan hal itu, pemetaan Guru di SMK dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan serta latar belakang program studi/kompetensi yang sesuai dengan spectrum kurikulum 2013. Pemetaan dilakukan berdasarkan data guru Produktif pada setiap satuan pendidikan, di mana terdapat garis koordinasi pada setiap kabupaten atau kota, sehingga akan menjadi data Guru Produktif pada tingkat Kabupaten pada suatu wilayah Provinsi. Selanjutnya, data guru produktif pada tingkat Provinsi ini dikoordinasikan kemudian menjadi peta atau data Guru Produktif setiap Provinsi, yang pada akhirnya akan menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan oleh Pemerintah untuk di jadikan data atau peta kebutuhan Guru Produktif secara Nasional.

## 3. Pemerataan Guru Produktif SMK

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan (SMK) dalam mencapai tujuan yang diinginkan tidak hanya tergantung dari sarana dan prasana yang dimiliki, kurikulum yang baik, serta sistem pembelajaran yang dimiliki, melainkan juga tergantung pada sumber daya manusia yang mengelola lembaga pendidikan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama, Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, masing-masing kementerian telah memiliki kewenangan untuk melakukan pemerataan dan pendayagunaan Guru sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, akan tetapi Peraturan Bersama tersebut belum dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu Menteri Pendidikan Nasional (Menteri Kebudayaan Dikdasmen) yang merupakan salah satu penanggung jawab dalam Sistem Pendidikan Nasional,





hususnya dalam bidang pendidikan dasar dan menengah dapat mengambil langkah dalam usaha memenuhi pemerataan kebutuhan Guru khususnya Guru Produktif SMK. Selain itu kebijakan wewenang penanganan SMK dapat diserahkan pada tingkat provinsi, sehingga akan memudahkan redistribusi guru pada kabupaten yang dianggap kurang, tanpa melalui kabupaten/kota.

#### 4. Pengadaan Guru Produktif SMK

Guru Produktif merupakan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada satuan pendidikan, khususnya SMK. Kehadiran guru produktif memiliki peran yang sangat penting dan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, oleh karena itu, guru produktif adalah guru yang selalu memiliki daya dan inovasi serta kreativitas dalam mengelola kegiatan pembelajaran kejuruan bagi para siswa. Jika seorang guru produktif kurang memiliki kompetensi yang cukup memadai, maka hasil belajar yang diperoleh kurang baik.

Dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diperlukan guru produktif yang profesional dan berkualitas serta memiliki kualifikasi dan kompetensi pada suatu bidang tertentu dan sesuai dengan kebutuhan SMK. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi. Selanjutnya, dalam pasal 8 disebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Oleh karena itu, kehadiran Guru Produktif sangat dibutuhkan di SMK dan dapat dilakukan dengan beberapa model seperti; Mekanisme pemenuhan kebutuhan Guru Produktif SMK. Adapun mekanisme yang dapat dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:

##### 4.1 Pengangkatan Guru

Kebutuhan guru pada satuan pendidikan khususnya SMK merupakan salah satu aspek yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan, tidak lepas dari peran serta guru produktif SMK dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kejuruan, sehingga karena dengan itu perlu dipandang untuk mengangkat guru produktif SMK yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu berdasarkan karakter dan kebutuhan sekolah tersebut. Adapun mekanisme atau kegiatan

pengangkatan guru produktif pada SMK yang dapat dilakukan sebagai berikut.

##### 4.1.1 Kegiatan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pendataan kekurangan Guru Produktif SMK;
- 2) Pengisian formasi Guru baru oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB;
- 3) Sosialisasi rekrutmen Guru Produktif SMK;
- 4) Pelaksanaan Seleksi Guru Produktif SMK, meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan Test Kompetensi Bidang (TKB);
- 5) Pengumuman Hasil Seleksi;
- 6) Penugasan sesuai formasi.

##### 4.1.2 Redistribusi Guru Produktif SMK:

- 1) Pendataan kondisi Guru Produktif SMK pada setiap satuan pendidikan;
- 2) Pengisian format pemerataan kebutuhan Guru Produktif SMK
- 3) Sosialisasi hasil isian Format pemerataan Guru Produktif SMK;
- 4) Seleksi Guru Produktif SMK
- 5) Pelaksanaan Redistribusi Guru Produktif SMK
- 6) Penugasan sesuai formasi.

##### 4.1.3 Pengadaan Guru Produktif SMK untuk pemenuhan Guru secara cepat:

Untuk memenuhi kebutuhan guru secara cepat dapat dilakukan dengan melalui beberapa program antara Dirjen GTK dengan LPTK Teknik. LPTK Teknik yang menyelenggarakan pendidikan calon guru SMK kejuruan ada 16 LPTK, dengan rincian 11 universitas dalam bentuk Fakultas dan 4 dalam bentuk jurusan/JPTK. Beberapa program yang dapat dilakukan antara Dirjen GTK-LPTK adalah:

- 1) Program *Talent scouting*; yaitu program yang melibatkan Mahasiswa tingkat akhir mengajar pada SMK yang kekurangan guru selama 6 bulan. Program ini dapat dilakukan kerja sama antara Dirjen GTK. Program ini pernah dilaksanakan oleh P2TK Dikmen Kemdikbud dengan LPTK.
- 2) Program Sarjana Mengajar, yaitu program yang menugaskan lulusan LPTK Teknik mengajar pada SMK yang kekurangan guru selama 6 bulan atau 12 bulan. Program ini dapat dilakukan kerja sama antara Dirjen GTK dengan LPTK Teknik. Program ini pula pernah dilakukan kerja sama antara P2TK Dikmen Kemdikbud dengan LPTK Teknik dan hasilnya sangat membantu permasalahan kekurangan guru di SMK.
- 3) Program Pendampingan SMK, adalah:
  - a. Program PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Pendampingan Guru Produktif SMK, adalah program dengan melibatkan





Mahasiswa tingkat akhir PPL selama 6 bulan ke SMK rujukan. Program ini dapat dilakukan kerja sama antara Dirjen GTK dengan LPTK Teknik dan Vokasi

- b. Program pendampingan SMK 1 tahun dengan melibatkan lulusan LPTK yang telah lulus sertifikasi (guru profesional, tapi belum diangkat PNS). Program ini dapat dilakukan kerjasama antara Dirjen Guru dengan LPTK.
- 4) Program Pemanfaatan Tenaga Ahli Industri, merekrut tenaga ahli Industri dan purna bakti melalui program RPL (Recognition Prior Learning/ Pengakuan Pengalaman Masa Lampau) guru produktif SMK.
- 5) Program SM3T Guru Produktif SMK, merupakan program pemenuhan kebutuhan guru yang sangat perlu dilakukan. Program ini pernah dilaksanakan kerja sama antara Direktorat P2TK Dikmen dengan LPTK Teknik dengan melibatkan lulusan LPTK selama 12 bulan (1 tahun) pada SMK wilayah 3T, namun program ini tidak berlanjut. Program ini dipandang sejalan dan sangat tepat dengan kebijakan pemerintah saat ini dalam penyiapan Guru.
- 6) Program Alih Status Guru Produktif SMK, adalah pengalihan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang memenuhi persyaratan menjadi Guru Produktif SMK.
- 7) Program Alih Fungsi/Spesialisasi, adalah upaya penyesuaian kompetensi keahlian Guru Produktif SMK untuk memenuhi kekurangan dan ketidaktersediaan guru pada program keahlian tertentu.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Strategi pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK merupakan suatu yang penting dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era abad XXI.
2. Analisis beban kerja Guru Produktif merupakan suatu kegiatan yang meliputi perhitungan kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan penjabaran dari kegiatan pembelajaran atau tatap-muka per jenis guru per minggu, kemudian dibagi dengan jumlah yakni 24 jam kali tatap muka, di mana alokasi jam pelajaran per minggu pada satuan pendidikan.
3. Pemetaan guru produktif SMK merupakan suatu kebijakan atau wewenang pemerintah dalam mendistribusi dan memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan kota/kabupaten dan provinsi secara Nasional.
4. Pemerataan Guru Produktif SMK merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam hal tenaga pendidik atau guru produktif pada satuan pendidikan tingkat menengah kejuruan (SMK) secara Nasional.
5. Pengadaan Guru Produktif SMK merupakan suatu model yang terjabarkan dalam suatu mekanisme untuk memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pada satuan pendidikan (SMK) melalui: (a) proses pengangkatan guru produktif SMK; (b) Redistribusi Guru Produktif SMK dan; (c) Pengadaan Guru Produktif SMK untuk pemenuhan guru secara cepat seperti Program *Talent Scouting*, Program Sarjana Mengajar dan Program Pendampingan SMK.

## DAFTAR RUJUKAN

- Depdikbud. 2015. Rencana dan Strategi 2015-2019. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. 2008. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru. Jakarta: Depdikbud.
- Dikdasmen. 2013. Perhitungan Kebutuhan Guru sesuai dengan Kurikulum 2013, Jakarta; Dikdasmen.
- Mulyadi, et.al. 2010. Studi Evaluasi Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Propinsi Bangka Belitung. *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI*
- Mastini, P. 2013. Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Beban Kerja dengan Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Ima Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana Udayana Denpasar.
- Kamdi, W. 2014. Kinerja Guru SMK: Analisis Beban Kerja dan Karakteristik Pembelajaran. *Jurnal Teknologi dan Kejuruan; Volume, 37(1).*



Steers, R.M. Porter, L.W. 2010. Motivation and Work Behavior. Hill Companies:McGraw.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdikbud

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Depdikbud.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Jakarta. Menpan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru Keputusan Dirjen Dikmen Kemdikbud No. 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 dan 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Jakarta. Menpan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah. Jakarta; Depdikbud